

DESENTRALISASI FISKAL DAN KESENJANGAN PENDAPATAN ANTARPROVINSI DI INDONESIA

Danar Sutopo Sidig

Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan, Jakarta-Indonesia Email: Danar.sutopo@kemenkeu.go.id

ABSTRAK

Fiscal Decentralization and Interprovincial Income Disparity In Indonesia. Fiscal decentralization is the devolution of authority over public finance and services from central government to local governments. This authority devolution is followed by tax base sharing and intergovernmental transfer mechanism. This policy is carried out with a reason to reduce the fiscal gap that might occur, both among local governments (horizontal imbalances) as well as between central government and local governments (vertical imbalances). This study aims to determine the effect of fiscal decentralization policy on reducing interprovincial income disparity in Indonesia. To achieve this goal, DAU dan DBH per capita is used as a proxy of fiscal decentralization while Gini coefficient is a proxy of interprovincial income disparity. Furthermore, empirical analysis is carried out using Ordinary Least Square (OLS) and panel data estimation (fixed effect – random effect estimation) on DAU and DBH per capita and Gini coefficient data of Indonesia's 33 provinces during the period of 2007 to 2016. In line with theories and previous research, the results of this study indicate that fiscal decentralization policies have a significant effect in reducing interprovincial income disparity in Indonesia.

KEYWORDS: *Fiscal decentralization, interprovincial income disparity, DAU, DBH, Gini coefficient*

Desentralisasi Fiskal dan Kesenjangan Pendapatan Antarprovinsi Di Indonesia. Desentralisasi fiskal merupakan pelimpahan wewenang atas keuangan publik dan pelayanan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pelimpahan wewenang tersebut diikuti dengan penyerahan sumber-sumber pendanaan berupa basis-basis perpajakan maupun melalui mekanisme transfer kepada pemerintah daerah. Penyerahan sumber-sumber pendanaan tersebut dilaksanakan dengan alasan untuk mengurangi kesenjangan yang mungkin terjadi, baik antarpemerintah daerah (*horizontal imbalances*) maupun antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (*vertical imbalances*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan kebijakan desentralisasi fiskal terhadap pengurangan kesenjangan pendapatan antarprovinsi di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, DAU dan DBH per kapita digunakan sebagai proksi dari desentralisasi fiskal sedangkan koefisien Gini sebagai proksi dari kesenjangan pendapatan antarprovinsi. Selanjutnya, analisis empiris dilaksanakan dengan menggunakan *Ordinary Least Square (OLS)* dan estimasi data panel (*fixed effect - random effect estimation*) terhadap data DAU dan DBH per kapita serta koefisien Gini dari 33 provinsi di Indonesia selama periode 2007 s.d. 2016. Sejalan dengan teori dan penelitian terdahulu, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan dalam mengurangi kesenjangan antarprovinsi di Indonesia.

KATA KUNCI: Desentralisasi fiskal, kesenjangan pendapatan antarprovinsi, DAU, DBH, koefisien Gini

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu poin perhatian utama dalam ilmu ekonomi adalah redistribusi pendapatan. Hal ini disebabkan redistribusi pendapatan merupakan kunci untuk menciptakan kesejahteraan dalam perekonomian. Kegagalan untuk melakukan redistribusi pendapatan akan berakibat pada tingginya tingkat kesenjangan pendapatan yang pada akhirnya akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Di antara kebijakan pemerintah yang berkaitan langsung dengan redistribusi pendapatan adalah desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal merupakan pelimpahan wewenang atas keuangan publik dan pelayanan pemerintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Tanzi 1995).

Di Indonesia, pelaksanaan desentralisasi fiskal di era reformasi secara resmi telah dimulai sejak 1 Januari 2001. Proses tersebut diawali dengan pengesahan Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (PKPD). Hingga kini, kedua regulasi tersebut sudah mengalami beberapa kali revisi sehingga yang terakhir adalah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Haryanto 2017).

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia ditujukan untuk menciptakan aspek kemandirian di daerah. Sebagai konsekuensinya, daerah kemudian menerima pelimpahan kewenangan di segala bidang, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal, serta keagamaan. Pelimpahan kewenangan tersebut juga diikuti dengan penyerahan sumber-sumber pendanaan berupa penyerahan basis-basis perpajakan maupun bantuan pendanaan melalui mekanisme transfer ke daerah sesuai dengan asas *money follows function*. Masih adanya mekanisme transfer ke daerah didasarkan pada pertimbangan untuk mengurangi kesenjangan yang mungkin terjadi baik antardaerah atau *horizontal imbalances* maupun antara pemerintah pusat dan daerah atau *vertical imbalances* (Haryanto 2017).

Berbagai penelitian telah dilaksanakan untuk mengukur keberhasilan kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia, khususnya dalam mengurangi kesenjangan pendapatan antardaerah/provinsi (*horizontal imbalances*). Namun, hasil akhir yang konklusif masih belum dapat dirumuskan (Dyah 2012). Penelitian Aritenang (2010), misalnya, menunjukkan bahwa kebijakan desentralisasi fiskal tidak memiliki peranan yang signifikan dalam mengurangi kesenjangan. Sebaliknya, penelitian-penelitian yang lain menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan. Namun, arah dari pengaruh tersebut masih terbagi menjadi dua, yaitu pengaruh negatif dan pengaruh positif. Penelitian Lewis (2001), Suwanan dan Sulistiani (2009), serta Sudhipongpracha dan Wongpredee (2016) menunjukkan bahwa kebijakan desentralisasi fiskal berpengaruh negatif terhadap kesenjangan pendapatan. Sementara itu, Dyah (2012) menyatakan bahwa kebijakan desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap kesenjangan pendapatan.

Di sisi lain, Kim dan Samudro (2017) menemukan bahwa arah dari pengaruh tersebut ditentukan oleh tingkat kemiskinan dari sebuah provinsi tertentu. Untuk provinsi-provinsi yang dikategorikan sebagai provinsi miskin, kenaikan jumlah dana transfer yang diterima akan menurunkan tingkat kesenjangan yang ada. Namun sebaliknya, untuk provinsi yang dikategorikan sebagai kaya, kenaikan jumlah dana transfer yang diterima justru akan meningkatkan kesenjangan pendapatan dari provinsi tersebut.

Sebagian dari penelitian-penelitian tersebut pada dasarnya menjadikan dana transfer tidak bersyarat (*unconditional grants*) sebagai proksi dari desentralisasi fiskal. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa dana transfer tidak bersyarat memberikan fleksibilitas yang tertinggi kepada pemerintah provinsi untuk merumuskan kebijakan yang sesuai dengan prioritas masing-masing. Dalam kebijakan desentralisasi fiskal yang diterapkan di Indonesia, dana transfer tidak bersyarat tersebut dikenal sebagai Dana Transfer Umum (DTU). DTU terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Penelitian terdahulu hanya menggunakan DAU saja atau DBH saja sebagai proksi dari desentralisasi fiskal.

Penggunaan DAU saja sebagai proksi desentralisasi fiskal antarlain dilakukan oleh Lewis (2001) serta Sudhipongpracha dan Wongpredee (2016). Adapun penggunaan DBH saja sebagai proksi desentralisasi fiskal antara lain dilakukan oleh Dyah (2012). Pemilihan DBH tersebut didasarkan pada kenyataan yang ada bahwa sebagian besar dari nilai DAU yang diterima oleh pemerintah provinsi telah dialokasikan untuk membiayai belanja pegawai provinsi yang bersangkutan. Dengan demikian, pemerintah provinsi tidak lagi bisa menggunakan DAU secara fleksibel sesuai dengan prioritasnya (Dyah 2012). Namun hal tersebut tidak sepenuhnya benar karena dengan telah dibiayainya belanja gaji oleh DAU maka pemerintah provinsi dapat menggunakan sumber pendapatan yang lain seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Lain-lain Pendapatan yang Sah secara lebih fleksibel sesuai dengan prioritasnya. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan secara bersama-sama, baik DAU maupun DBH, sebagai proksi dari desentralisasi fiskal. Lebih lanjut, DAU dan DBH tersebut dinyatakan dalam ukuran per kapita untuk menangkap pengaruh populasi terhadap DAU dan DBH.

Di samping perbedaan tersebut, jika dibandingkan penelitian-penelitian terdahulu, penelitian ini menggunakan data dengan periode yang relatif lebih lama dan lebih mutakhir, yaitu selama 10 tahun dari tahun 2007 s.d. 2016. Hal ini penting untuk dilakukan mengingat penelitian-penelitian terkini pada bidang ini masih belum menggunakan data yang mutakhir. Sebagai contoh, penelitian Dyah (2012) masih menggunakan data dari tahun 2003 s.d. 2009. Adapun penelitian Sudhipongpracha dan Wongpredee (2016) hanya menggunakan data tahun 2011. Bahkan, penelitian terkini pada bidang ini yang dilaksanakan oleh Kim dan Samudro (2017) masih menggunakan data tahun 2006 dan 2011. Oleh karena itu, penggunaan periode data yang lebih panjang dan lebih mutakhir pada penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan gambaran yang lebih representatif dan *up to date* dari penerapan kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia beserta seluruh upaya perbaikan yang senantiasa telah dilaksanakan.

Selanjutnya, penelitian ini juga menggunakan koefisien Gini sebagai proksi dari kesenjangan pendapatan antarprovinsi. Pemilihan koefisien Gini tersebut mengikuti apa yang juga telah dilakukan oleh Suwanan dan Sulistiani (2009) serta Dyah (2012). Menurut Dyah (2012), keuntungan utama penggunaan koefisien Gini adalah bahwa koefisien Gini mengukur tingkat kesenjangan dengan menggunakan analisis rasio. Hal ini menjadikan ukuran kesenjangan dapat diinterpretasikan dengan mudah. Lebih dari itu, kesederhanaan konsep pengukuran pada koefisien Gini memungkinkan untuk dilakukannya perbandingan kesenjangan antarwilayah dan antarkelompok tertentu.

Pada akhirnya, untuk mengukur keberhasilan kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia dalam mengurangi tingkat kesenjangan pendapatan antarprovinsi, analisis empiris akan dilaksanakan dengan menggunakan *Ordinary Least Square* (OLS) dan estimasi data panel (*fixed effect* dan *random effect estimation*). Analisis empiris tersebut akan dilaksanakan terhadap data DAU dan DBH per kapita serta koefisien Gini dari 33 provinsi di Indonesia selama periode 2007 s.d. 2016. Peneliti mengeluarkan provinsi Kalimantan Utara dari pengamatan karena provinsi tersebut baru terbentuk pada tahun 2012 sehingga data tahun 2007 s.d. 2012 tidak tersedia untuk dianalisis.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian penjelasan dalam latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah kebijakan desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap pengurangan kesenjangan pendapatan antarprovinsi di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan kebijakan desentralisasi fiskal terhadap pengurangan kesenjangan pendapatan antarprovinsi di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi umpan balik bagi penerapan kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia. Hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai salah satu referensi untuk mengukur keberhasilan kebijakan desentralisasi fiskal, khususnya dalam mengurangi kesenjangan pendapatan antarprovinsi di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah selanjutnya dapat melaksanakan tindakan-tindakan yang tepat sebagai langkah tindak lanjut.

1.5. Organisasi Penulisan

Studi ini disajikan dalam beberapa pokok bahasan. Pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan organisasi penulisan. Kedua, kerangka teori dan pengembangan hipotesis yang terdiri dari landasan teori, review literatur, pengembangan hipotesis, dan model penelitian. Ketiga adalah metodologi penelitian yang terdiri dari sumber data, konsep pengukuran kesenjangan pendapatan dan desentralisasi, serta metode analisis. Keempat, hasil dan pembahasan yang terdiri dari data riset dan deskripsi statistik serta analisis data dan pembahasan. Selanjutnya adalah kesimpulan serta yang terakhir adalah implikasi dan keterbatasan.

2. KERANGKA TEORETIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Landasan Teori

Istilah 'desentralisasi fiskal' mengacu pada pelimpahan wewenang dalam bidang keuangan publik dan pelayanan pemerintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Tanzi 1995). Pelimpahan wewenang tersebut berkaitan dengan empat hubungan fiskal antartingkat pemerintahan yang berupa tanggung jawab terkait dengan keputusan (i) belanja, (ii) pajak dan kemampuan menciptakan pendapatan, (iii) pinjaman daerah, serta (iv) transfer fiskal antartingkat pemerintah. (Vo 2009).

Sebuah kontribusi yang cukup berpengaruh dalam bidang desentralisasi fiskal antara lain diberikan oleh Musgrave (1959) melalui bukunya yang berjudul "*Theory of Public Finance – A Study in Public Economy*". Dalam bukunya tersebut, Musgrave memperkenalkan tiga cabang keuangan publik yang terdiri dari fungsi stabilisasi ekonomi, distribusi pendapatan, dan alokasi sumber daya. Fungsi stabilisasi ekonomi dan distribusi pendapatan akan lebih efektif jika dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah pusat. Sedangkan fungsi alokasi sumber daya akan lebih efisien manakala kewenangan pelaksanaannya dilimpahkan kepada pemerintah daerah melalui desentralisasi fiskal (Oates 1972). Hal ini didasarkan pada dua pertimbangan utama. Pertama, sumber daya akan dapat dialokasikan secara lebih efisien melalui sistem desentralisasi fiskal karena pemerintah daerah memiliki pemahaman yang lebih baik terkait bagaimana memaksimalkan manfaat dari penggunaan sumber daya yang ada di daerah masing-masing. Kedua, sentralisasi penyediaan barang publik tertentu oleh pemerintah pusat akan menjadi tidak

efisien manakala preferensi untuk barang publik tersebut berbeda menurut wilayah, yurisdiksi, atau tingkat pemerintahan. Dalam kondisi yang demikian, pemerintah daerah memiliki potensi untuk dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien (Vo 2009). Dengan demikian, manakala diberi kewenangan yang memadai untuk menghasilkan pendapatan, pemerintah daerah dapat mengalokasikan sumber daya yang ada secara efisien untuk memproduksi barang publik yang sesuai dengan preferensinya (Boadway dan Shah 2007).

Pada kenyataannya pemerintah daerah cenderung gagal dalam mencapai tingkat pendapatan pajak yang diperlukan untuk membiayai pelaksanaan tugas dan fungsinya. Hal tersebut dikarenakan tingginya biaya administrasi dan kesulitan teknis dalam pemungutan pajak. Dalam kondisi yang demikian, diperlukan adanya sebuah mekanisme transfer antarpemerintah sebagai kompensasi atas penerimaan pajak daerah yang terbatas tersebut. Bahkan, di negara-negara yang hari ini menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal, proporsi pendapatan transfer dari pemerintah pusat mencapai 67% s.d. 75% dari total pendapatan pemerintah daerah (Schroeder 2007). Namun, hal yang kemudian perlu menjadi perhatian utama bukanlah pada seberapa besar proporsi pendapatan transfer tersebut terhadap total pendapatan, melainkan bagaimana kebijakan transfer tersebut didesain dan dikombinasikan. Dengan kata lain, meskipun seluruh belanjanya dibiayai dari pendapatan transfer, sebuah pemerintah daerah tertentu akan mampu sepenuhnya bertanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah pusat manakala kebijakan transfer didesain dan dikombinasikan secara tepat (Bird and Smart 2002). Sebaliknya, mekanisme transfer yang buruk atau tidak memadai, akan menjadikan pendapatan transfer tersebut tidak dapat mencapai tujuan yang diharapkan meskipun proporsinya hanya 10% dari total belanja pemerintah daerah (Köthenbürger 2002).

Pada umumnya, negara-negara yang mengadopsi kebijakan desentralisasi fiskal akan menerapkan kombinasi dana transfer yang terdiri dari pendapatan bagi hasil, transfer tidak bersyarat, dan transfer khusus (Ahmad dan Searle 2006). Di Indonesia, kombinasi tersebut dikenal sebagai Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana transfer semacam ini diperlukan dalam rangka mengatasi adanya kesenjangan di antara unit pemerintah, baik kesenjangan fiskal vertikal/*vertical imbalances* maupun kesenjangan fiskal horisontal/*horizontal imbalances* (Sudhipongpracha dan Wongpredee 2016).

Kesenjangan fiskal vertikal merupakan kesenjangan yang terjadi di antara berbagai tingkat pemerintahan, misalnya antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Kesenjangan ini terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara sarana pengumpulan pendapatan dengan kebutuhan belanja pada tiap tingkatan pemerintahan tersebut. Hal ini merupakan sebuah akibat dari kenyataan bahwa pada mayoritas negara yang telah menerapkan desentralisasi fiskal, pemerintah pusat masih mengumpulkan banyak pendapatan dari sumber-sumber pendapatan di daerah. Di sisi lain, pemerintah daerah justru harus bertanggung jawab atas penyediaan berbagai layanan publik (Sorens 2014). Meskipun, pada beberapa negara setelah kebijakan desentralisasi fiskal diterapkan, pemerintah daerah juga sudah diberikan otoritas yang memadai untuk memungut pajak (Frumence et al. 2013).

Akan tetapi, fakta yang ada menunjukkan bahwa pemerintah daerah tetap tidak mampu mengumpulkan pendapatan yang mencukupi untuk membiayai belanjanya. Hal ini disebabkan oleh adanya keterbatasan kapasitas administratif maupun

kondisi perekonomian lokal. Oleh karena itu, dalam kondisi yang demikian pemerintah pusat menggunakan pendapatan bagi hasil [di Indonesia dikenal sebagai Dana Bagi Hasil-DBH] sebagai sarana untuk mengurangi adanya kesenjangan vertikal (Sudhipongpracha dan Wongpredee 2016). Namun, setelah solusi tersebut diterapkan, sebuah masalah kesenjangan yang lain masih tetap ada di antara pemerintah daerah yang kaya dan yang miskin atau dikenal sebagai kesenjangan fiskal horizontal (Sorens 2014).

Kesenjangan fiskal horizontal merujuk pada perbedaan pendapatan dan belanja di antara unit pemerintah pada tingkatan yang sama, misalnya di antara pemerintah provinsi maupun di antara pemerintah kabupaten/kota. Kesenjangan ini dapat diatasi dengan menerapkan teknik *fiscal dentistry*, yaitu dengan memberikan dana transfer yang memadai untuk menyelaraskan pendapatan dan belanja di antara unit-unit pemerintahan. Dana transfer semacam ini dikenal sebagai transfer bertujuan umum atau transfer tidak bersyarat. Dana transfer ini di Indonesia dikenal dengan istilah Dana Alokasi Umum (DAU).

Dalam praktiknya, untuk menghindari terjadinya inefektivitas penyaluran dana, sistem alokasi dana transfer tidak bersyarat harus didasarkan pada kapasitas fiskal dari setiap pemerintah daerah. Untuk menerapkan hal ini, berbagai cara telah dipilih oleh negara-negara penganut sistem desentralisasi fiskal. Di Pakistan, misalnya, pengalokasian dana transfer tidak bersyarat sepenuhnya didasarkan pada ukuran populasi tiap provinsi (Kim dan Smoke 2003). Sementara itu, di Kamboja alokasi dana transfer tidak bersyarat tersebut didasarkan pada "*Poverty Severity Index*". Di sisi lain, di Filipina dan India, alokasi dana transfer tidak bersyarat tersebut dilaksanakan dengan berdasarkan pada berbagai variabel, seperti luasan area tanah dan pendapatan per kapita (Kim et al. 2003).

Adapun di Indonesia, alokasi DAU menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 didasarkan pada alokasi dasar dan celah fiskal. Alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah. Adapun Celah fiskal merupakan kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah. Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum yang dihitung dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Produk Domestik Regional Bruto per Kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia. Sedangkan kapasitas fiskal daerah merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah dan pendapatan bagi hasil.

2.2. Reviu Literatur

Berbagai penelitian telah dilaksanakan untuk menguji hubungan antara desentralisasi fiskal dengan kesenjangan pendapatan, tetapi sebuah hasil akhir yang konklusif masih belum dapat dirumuskan. Secara umum, hasil penelitian-penelitian tersebut dapat dikategorikan menjadi dua pandangan utama. Pandangan pertama adalah sebagaimana yang disarankan oleh teori klasik, berpendapat bahwa pemerintah daerah seharusnya berfokus pada kebijakan-kebijakan regional yang sesuai dengan kebutuhan lokal (fungsi alokasi) dan menyerahkan sepenuhnya kebijakan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan (fungsi distribusi) pada pemerintah pusat. Pandangan kedua adalah sebagaimana yang dinyatakan dalam sebagian penelitian-penelitian terkini bahwa dalam desentralisasi fiskal, pemerintah daerah bisa saja memengaruhi kesenjangan pendapatan regional. (Dyah, 2012).

Contoh penelitian yang menganut pandangan pertama antara lain adalah sebuah penelitian komparasi antarnegara yang dilaksanakan oleh Shankar dan Shar (2003).

Penelitian tersebut menemukan bahwa kebijakan desentralisasi fiskal mengalami kegagalan di hampir seluruh negara, baik negara federal maupun kesatuan. Namun, negara federal masih berkinerja lebih baik dalam mencegah terjadinya ketimpangan pendapatan regional karena pada pemerintah federal, terjadinya ketimpangan memiliki risiko yang lebih besar. Hasil penelitian ini oleh Suwanan dan Sulistiani (2009) dianggap ambigu karena dilaksanakan hanya untuk periode yang sangat singkat dengan menggunakan data runtut waktu (*time series*) dan hanya mengukur desentralisasi berdasarkan klasifikasi suatu negara sebagai negara kesatuan atau negara federasi, tanpa menggunakan ukuran finansial desentralisasi. Penelitian lain, yang dilaksanakan oleh Bonet (2006) dengan menganalisa sekelompok data panel dari negara Kolombia selama periode tahun 1990 s.d. 2000 menemukan bahwa terdapat pengaruh negatif di antara kebijakan desentralisasi fiskal terhadap kesenjangan pendapatan regional. Lebih lanjut, studi ini membawa beberapa kemajuan pada bidang penelitian desentralisasi fiskal dan kesenjangan pendapatan. Pertama, penelitian tersebut memperkenalkan pendekatan data panel untuk menangkap dinamika yang terjadi dalam implementasi kebijakan desentralisasi fiskal. Kedua, analisis yang dilaksanakan didasarkan hanya pada pengalaman dari satu negara saja, bukan pada perbandingan lintas negara. Hasilnya, pengaruh desentralisasi fiskal yang diteliti tersebut dapat diestimasi secara lebih objektif karena terbebas dari variasi-variasi budaya, sejarah, dan institusi.

Di sisi lain, pandangan kedua antara lain diungkapkan oleh Kim et al. (2003) dalam penelitiannya yang dilaksanakan menggunakan data pada negara Korea selama periode tahun 1971 s.d. 1997. Mereka menemukan bahwa kebijakan desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap terjadinya kesenjangan pendapatan regional. Namun, hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa penelitian ini tidak secara langsung mengukur tingkat penerapan kebijakan desentralisasi di Korea. Peneliti hanya menggunakan distribusi spasial dari pelayanan publik seperti layanan transportasi, air bersih, pendidikan, jaringan informasi, dan penyediaan kesempatan kerja sebagai ukuran desentralisasi fiskal. Penelitian lainnya adalah penelitian Akai dan Sakata (2005) yang dilaksanakan dengan menggunakan data *cross-section* dari negara Amerika Serikat (tidak termasuk data konvergensi pendapatan daerah) untuk memeriksa hubungan di antara desentralisasi fiskal dan kesenjangan pendapatan regional. Mereka menemukan bahwa belanja daerah atau pendapatan bagi hasil dalam desentralisasi fiskal tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesenjangan pendapatan. Terakhir, penelitian Kanbur dan Zhang (2005) yang mencoba untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan perubahan kesenjangan regional di negara China selama setengah abad terakhir menemukan bahwa kebijakan desentralisasi fiskal turut berkontribusi terhadap adanya peningkatan tajam dalam kesenjangan pendapatan regional di negara tersebut selama periode reformasi, yaitu tahun 1980 s.d. 1990.

Untuk kasus di Indonesia, penelitian-penelitian terkini dalam kaitannya dengan pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kesenjangan pendapatan regional antara lain adalah penelitian Suwanan dan Sulistiani (2009), Aritenang (2010), Dyah (2012), Sudhipongpracha dan Wongpredee (2016), serta Kim dan Samudro (2017). Menggunakan data panel dinamis dari 33 provinsi di Indonesia selama tahun 2001 s.d. 2008, Suwanan dan Sulistiani (2009) menyimpulkan bahwa tingkat desentralisasi yang tinggi berhubungan dengan rendahnya tingkat kesenjangan pendapatan antarprovinsi. Dalam penelitian tersebut, Suwanan dan Sulistiani

menggunakan *revenue decentralization (revdec)* sebagai proksi dari desentralisasi fiskal serta menggunakan koefisien Gini sebagai proksi dari kesenjangan pendapatan.

Di sisi lain, Aritenang (2010) menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan di antara provinsi di Indonesia selama periode 1993 s.d. 2006 berada pada kondisi yang parah. Kesenjangan tersebut tetap mengalami peningkatan bahkan setelah kebijakan desentralisasi fiskal dilaksanakan, sebelum akhirnya kembali menurun setelah tahun 2002. Namun demikian, peneliti menemukan bahwa fluktuasi tingkat kesenjangan tersebut tidak secara signifikan dipengaruhi oleh penerapan kebijakan desentralisasi fiskal. Kesimpulan tersebut, diperoleh setelah meregresikan pertumbuhan tingkat kemiskinan terhadap beberapa variabel bebas yang dianggap berkontribusi. Lebih lanjut, untuk melihat pengaruh desentralisasi fiskal, peneliti menggunakan indeks interaksi di antara variabel *dummy* desentralisasi fiskal dengan tingkat pendapatan minyak bumi dan gas, jumlah total pendapatan dari sebuah provinsi tertentu, investasi langsung dari luar negeri, investasi modal tetap provinsi, pembangunan sarana kesehatan, dan perubahan kondisi makroekonomi tahunan.

Hasil yang berbeda dengan dua penelitian sebelumnya, ditunjukkan dalam penelitian Dyah (2012). Menggunakan *Ordinary Least Square (OLS)* dan data panel dari 30 provinsi di Indonesia sepanjang periode 2003 s.d. 2009, Dyah menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesenjangan pendapatan antarprovinsi. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat desentralisasi fiskal yang diterapkan maka akan semakin meningkat pula kesenjangan yang ada. Studi tersebut menggunakan Dana Bagi Hasil (DBH) per kapita sebagai proksi desentralisasi fiskal serta koefisien Gini sebagai proksi kesenjangan pendapatan. Pemilihan DBH tersebut didasarkan pada argumen bahwa DBH merupakan salah satu jenis dari Dana Transfer Umum (DTU) yang merupakan transfer tidak bersyarat sehingga pemerintah daerah dapat menggunakannya dengan fleksibilitas tertinggi sesuai dengan kebutuhan lokal.

Penelitian lainnya adalah penelitian Sudhipongpracha dan Wongpredee (2016). Penelitian ini menguji sampai sejauh mana kebijakan desentralisasi fiskal berperan dalam mengatasi kesenjangan pendapatan. Berdasarkan data tahun 2011, disimpulkan bahwa telah terjadi kesenjangan pendapatan antardaerah yang signifikan yang diukur dengan menggunakan pendapatan per kapita. Kesenjangan juga ditemukan dalam DAU per kapita sebagai proksi dari desentralisasi. Berdasarkan kedua fakta tersebut, meski tanpa melakukan sebuah metode statistik inferensia, peneliti berkesimpulan bahwa DAU di Indonesia telah menjadi sarana yang efektif untuk pemerataan pendapatan daerah.

Selanjutnya, penelitian terkini dalam bidang ini adalah penelitian Kim dan Samudro (2017). Penelitian ini menggunakan pendekatan yang berbeda dalam mengidentifikasi pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kesenjangan pendapatan regional. Penelitian ini membedakan pengaruh desentralisasi fiskal yang terjadi pada provinsi yang diklasifikasikan sebagai kaya dari pengaruh yang terjadi pada provinsi yang diklasifikasikan sebagai miskin. Dengan melakukan metode regresi *Ordinary Least Square (OLS)* terhadap data *cross-section* kesenjangan pendapatan regional tahun 2006 dan 2011, mereka menemukan bahwa pemberian dana transfer dalam kebijakan desentralisasi fiskal kepada provinsi yang kaya tidak berpengaruh signifikan dalam mengurangi kesenjangan pendapatan. Namun sebaliknya, dana transfer yang diberikan kepada provinsi-provinsi yang miskin memiliki pengaruh

yang signifikan dalam mengurangi kesenjangan regional. Oleh karena itu, peneliti berkesimpulan bahwa kebijakan desentralisasi fiskal sudah berada pada jalur yang benar untuk mencapai salah satu tujuannya, yaitu untuk mengurangi kesenjangan pendapatan regional.

2.3. Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan teori federalisme dan desentralisasi fiskal Musgrave, terdapat tiga katagori cabang keuangan publik, yaitu stabilisasi makro, distribusi pendapatan, dan alokasi sumber daya. Fungsi stabilisasi makro dan distribusi pendapatan merupakan kewenangan pemerintah pusat. Adapun alokasi sumber daya merupakan kewenangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah dianggap mampu mengalokasikan sumber daya, baik sumber daya asli daerah maupun sumber daya yang berasal dari dana transfer pemerintah pusat, secara lebih efisien sesuai dengan kebutuhan dan preferensi lokal. Implikasi dari pembagian kewenangan tersebut adalah bahwa kebijakan distribusi pendapatan yang tepat oleh pemerintah pusat melalui mekanisme pemberian dana transfer kepada pemerintah daerah serta alokasi dana transfer tersebut secara efisien oleh pemerintah daerah diharapkan dapat mengurangi kesenjangan pendapatan antarprovinsi.

Teori tersebut telah dikonfirmasi oleh berbagai penelitian di luar maupun di dalam negeri. Di luar negeri, penelitian Bonet (2006) menunjukkan bahwa kebijakan desentralisasi fiskal di Kolombia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kesenjangan pendapatan regional. Hal ini berarti bahwa penerapan kebijakan desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan dalam mengurangi tingkat kesenjangan pendapatan yang ada di negara tersebut. Adapun di Indonesia, penelitian yang sejalan dengan teori federalisme dan desentralisasi fiskal Musgrave tersebut antara lain adalah penelitian Suwanan dan Sulistiani (2009), Sudhipongpracha dan Wongpredee (2016), serta Kim dan Samudro (2017). Seluruh penelitian tersebut menyatakan bahwa kebijakan desentralisasi fiskal berpengaruh dalam mengurangi kesenjangan pendapatan antarprovinsi yang ada di Indonesia.

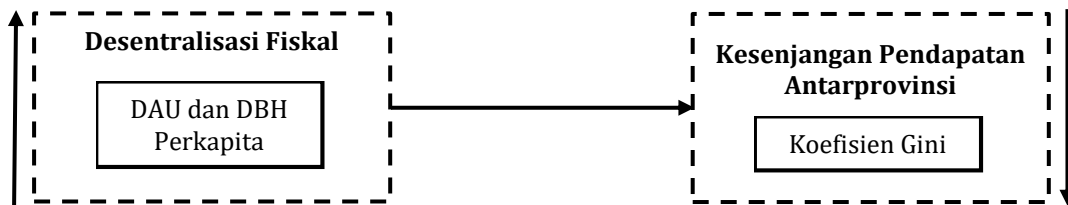
Penelitian ini, sebagaimana penelitian terdahulu, bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebijakan desentralisasi fiskal dalam mengurangi kesenjangan pendapatan antarprovinsi di Indonesia. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, antara lain adalah bahwa penelitian ini menggunakan data yang lebih mutakhir. Hal ini penting untuk dilakukan karena di antara penelitian terdahulu, data paling mutakhir yang digunakan adalah data tahun 2011, yaitu pada penelitian Sudhipongpracha dan Wongpredee (2016) serta Kim dan Samudro (2017). Di sisi, lain, selama periode waktu tahun 2012 s.d. saat ini (2018), berbagai perbaikan dalam kebijakan desentralisasi fiskal telah dilaksanakan oleh Pemerintah. Diharapkan, penggunaan data yang lebih mutakhir akan dapat lebih merepresentasikan kondisi terkini pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia. Oleh karena itu, dengan menggunakan data tahun 2007 s.d. 2016, penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut.

H_a : Kebijakan desentralisasi fiskal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kesenjangan pendapatan regional provinsi di Indonesia.

2.4. Model Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan kebijakan desentralisasi fiskal terhadap kesenjangan pendapatan antarprovinsi. Diharapkan, semakin tinggi derajat penerapan desentralisasi fiskal akan berakibat pada tingkat

kesenjangan pendapatan yang semakin menurun. Oleh karena itu, model penelitian ini dapat diilustrasikan sebagai berikut.



Gambar 1. Model Penelitian
Sumber: Hasil olah peneliti

3. Metode Penelitian

3.1. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data dari 33 provinsi di Indonesia selama periode sepuluh tahun, yaitu tahun 2007 sampai dengan 2016. Data setiap provinsi tersebut merupakan data agregat dari pemerintah daerah dalam provinsi yang bersangkutan. Semua data yang digunakan dalam penelitian ini yang meliputi data koefisien Gini, transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dan jumlah penduduk diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

3.2. Konsep Pengukuran Kesenjangan Regional dan Desentralisasi

Desentralisasi fiskal di Indonesia berfokus pada derajat autonomi pemerintah daerah untuk menciptakan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa pemerintah daerah memiliki pengetahuan terbaik mengenai kebutuhan lokal dalam lingkup pemerintahannya. Berdasarkan hal tersebut, studi ini akan berfokus pada pemerintah daerah sebagai institusi yang setiap kebijakannya akan memiliki dampak langsung terhadap kondisi lokal (Dyah 2012).

Penelitian ini menggunakan koefisien Gini sebagai variabel terikat serta DAU ditambah DBH per kapita (DAU DBH per kapita) sebagai variabel bebas. Koefisien Gini merupakan pengukuran dari kosep kesenjangan antarprovinsi sedangkan DAU DBH per kapita merupakan pengukuran dari desentralisasi. Pemilihan variabel-variabel tersebut didasarkan pada teori dan penelitian terdahulu seperti penelitian Suwanan and Sulistiani (2009), Aritenang (2010), Dyah (2012), serta Kim dan Samudro (2017).

Merujuk pada Aritenang (2010), terdapat beberapa pengukuran kesenjangan regional, seperti koefisien variasi, Theil indeks, dan koefisien Gini. Lebih lanjut, Aritenang juga menunjukkan bahwa untuk periode tahun 1993 s.d. 2006, seluruh metode pengukuran tersebut menunjukkan fluktuasi kesenjangan yang sama. Namun, menurut Dyah (2012), keuntungan utama penggunaan koefisien Gini adalah bahwa koefisien Gini mengukur tingkat kesenjangan dengan menggunakan analisis rasio. Hal ini menjadikan ukuran kesenjangan dapat diinterpretasikan dengan mudah. Di samping itu, kesederhanaan konsep pengukuran koefisien Gini memungkinkan dilakukannya perbandingan kesenjangan antarwilayah dan antarkelompok tertentu. Selanjutnya, seperti halnya instrumen pengukuran berbasis waktu lainnya, koefisien Gini juga dapat digunakan untuk membandingkan kesenjangan pendapatan dalam kurun waktu tertentu. Dengan demikian, penggunaan koefisien gini memungkinkan adanya pengamatan terkait peningkatan atau penurunan kesenjangan secara independen terhadap pendapatan absolut.

Di samping kelebihan-kelebihan tersebut, koefisien Gini memiliki keterbatasan yang terutama terletak pada sifatnya yang relatif sehingga tidak menyediakan informasi mengenai kekayaan absolut. Namun demikian, koefisien Gini tetap digunakan secara luas dalam berbagai riset sebagai ukuran kesenjangan. Mengikuti pendekatan penelitian-penelitian tersebut, peneliti memilih koefisien Gini sebagai proksi untuk kesenjangan regional.

Di sisi lain, penelitian ini menggunakan DAU DBH per kapita sebagai proksi untuk desentralisasi fiskal. Ukuran tersebut dinyatakan sebagai ukuran per kapita untuk menangkap pengaruh populasi terhadap DAU dan DBH. DAU dan DBH merupakan dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersifat tanpa syarat (*unconditional grants*). Hal ini berarti bahwa DAU dan DBH tersebut memberikan pemerintah daerah tingkat fleksibilitas yang tertinggi dalam menggunakannya sesuai dengan kebijakan prioritas daerah.

Meskipun demikian, pada umumnya penelitian terdahulu hanya menggunakan DAU saja atau DBH saja sebagai proksi dari desentralisasi fiskal. Penggunaan DAU saja sebagai proksi desentralisasi fiskal antarlain dilakukan oleh Lewis (2001) serta Sudhipongpracha dan Wongpredee (2016). Adapun penggunaan DBH saja sebagai proksi desentralisasi fiskal antara lain dilakukan oleh Dyah (2012). Pemilihan DBH tersebut didasarkan pada kenyataan yang ada bahwa sebagian besar dari nilai DAU yang diterima oleh pemerintah provinsi telah dialokasikan untuk membiayai belanja pegawai provinsi yang bersangkutan. Dengan demikian, pemerintah provinsi tidak lagi bisa menggunakan DAU secara fleksibel sesuai dengan prioritasnya (Dyah 2012). Namun hal tersebut tidak sepenuhnya benar karena dengan telah dibiayainya belanja gaji oleh DAU maka pemerintah provinsi dapat menggunakan sumber pendapatan yang lain seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Lain-lain Pendapatan yang Sah secara lebih fleksibel sesuai dengan prioritasnya. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan secara bersama-sama, baik DAU maupun DBH, sebagai proksi dari desentralisasi fiskal. Lebih lanjut, DAU dan DBH tersebut dinyatakan dalam ukuran per kapita untuk menangkap pengaruh populasi terhadap DAU dan DBH.

Berdasarkan pada penjelasan tersebut, model empiris yang digunakan untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kesenjangan pendapatan antarprovinsi dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut.

$$GINI_{it} = \alpha + \beta_1 DAUDBHCAP_{it} + \varepsilon$$

Persamaan tersebut menjelaskan koefisien Gini (variabel terikat) dan DAU DBH per kapita (variabel bebas) yang diamati untuk wilayah i pada waktu t . Wilayah i meliputi seluruh provinsi yang ada di Indonesia, kecuali Kalimantan Utara yang sengaja dikeluarkan dari pengamatan karena data tahun 2007 s.d. 2012 tidak tersedia. Adapun waktu t merupakan periode tahun 2007 s.d. 2016.

3.3. Metode Analisis

Analisis data dilakukan menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS). OLS adalah metode untuk memperkirakan parameter yang tidak diketahui dalam model regresi linier. Agar konsisten, OLS mensyaratkan bahwa seluruh regressor yang digunakan bersifat eksogen tanpa multikolinieritas, homoskedastis, tidak berkorelasi secara serial, dan terdistribusi secara normal.

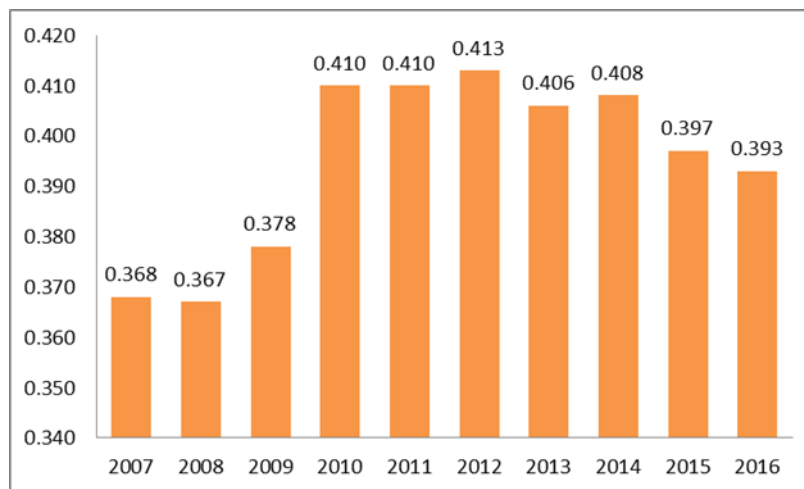
Analisis OLS terhadap 330 observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan perangkat lunak Eviews 9. Tahapan analisis tersebut terdiri dari (1) pemilihan model yang sesuai di antara model *common effect*, *fixed effect*, dan *random*

effect; (2) uji asumsi klasik yang meliputi uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan uji normalitas; serta (3) penafsiran atas hasil pengujian. Uji asumsi klasik multikoleniaritas tidak perlu dilakukan karena di dalam penelitian ini hanya terdapat satu variabel bebas.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Data Riset dan Deskripsi Statistik

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kesenjangan pendapatan antarprovinsi di Indonesia. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh BPS pada situs www.bps.go.id, tingkat kesenjangan pendapatan nasional Indonesia yang diukur dengan koefisien Gini adalah sebagai berikut.

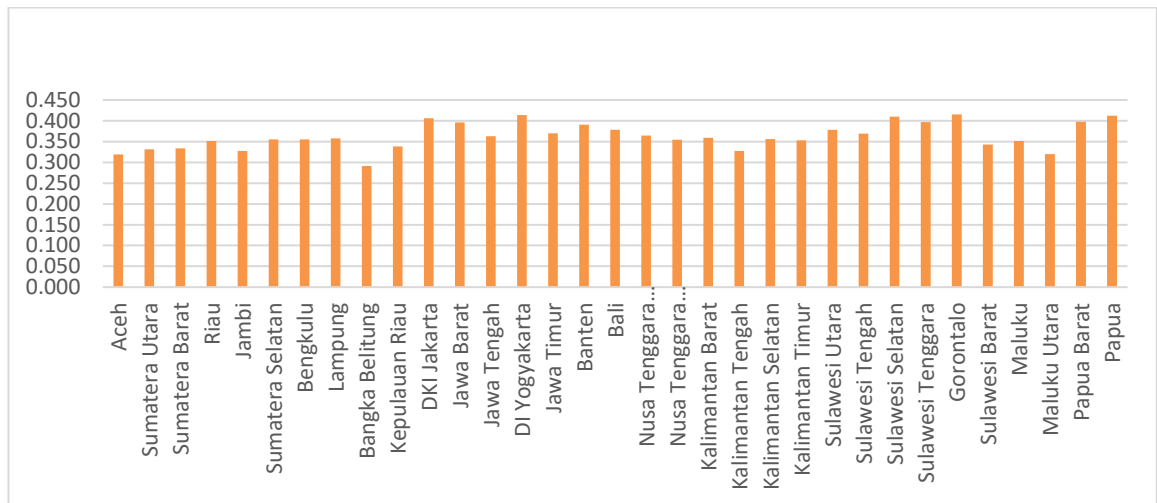


Gambar 2. Koefisien Gini Nasional Periode 2007 s.d. 2016

Sumber: Diolah dari Data www.BPS.go.id

Berdasarkan diagram batang di atas, selama periode pengamatan, kesenjangan pendapatan di Indonesia pasca dilaksanakannya desentralisasi tidak selalu menunjukkan tren yang menurun. Kesenjangan pendapatan berdasarkan koefisien Gini mengalami peningkatan selama periode 2007 s.d. 2012 sebelum akhirnya konsisten menurun pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016. Kondisi kesenjangan yang paling rendah terjadi pada tahun 2008 dengan nilai koefisien Gini sebesar 0,367. Adapun kondisi kesenjangan yang tertinggi terjadi pada tahun 2012 dengan koefisien Gini sebesar 0,413. Nilai kesenjangan tersebut bukan nilai yang tinggi, meskipun bukan pula sebuah nilai yang rendah. Nilai koefisien Gini memiliki rentang dari 0 s.d. 1. Semakin tinggi nilai koefisien Gini menunjukkan semakin tingginya tingkat kesenjangan pendapatan yang terjadi. Sebaliknya, semakin rendah nilai koefisien Gini, semakin rendah pula tingkat kesenjangan pendapatan yang ada.

Sementara itu, untuk level provinsi, rata-rata koefisien Gini yang terjadi selama sepuluh tahun periode observasi adalah sebagai berikut.

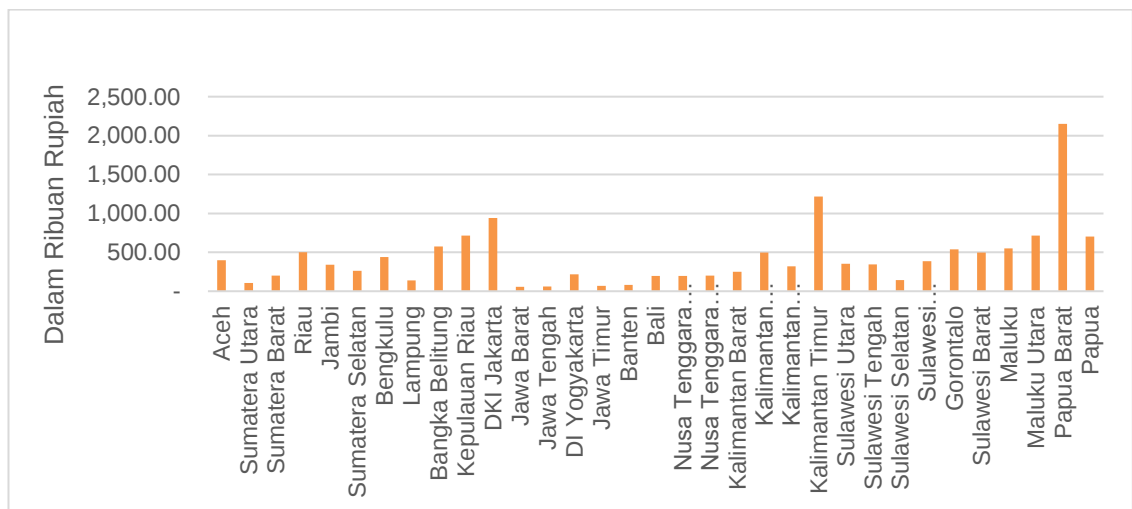


Gambar 3. Koefisien Gini Rata-rata Per Provinsi Periode 2007 – 2016

Sumber: Diolah dari Data www.BPS.go.id

Berdasarkan diagram tersebut, rata-rata nilai koefisien Gini tiap provinsi selama 10 tahun periode pengamatan menunjukkan adanya pola yang hampir seragam. Rata-rata kesenjangan yang paling rendah dicapai oleh provinsi Bangka Belitung dengan nilai koefisien Gini sebesar 0,291. Sebaliknya, rata-rata kesenjangan yang paling tinggi terjadi pada provinsi Gorontalo, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Papua dengan nilai koefisien Gini berturut-turut adalah 0,415; 0,414; dan 0,412. Adapun dari sisi median, nilainya adalah sebesar 0,358. Nilai tersebut berada sedikit di bawah nilai rata-rata, yaitu sebesar 0,363. Di antara ke-33 provinsi yang ada di Indonesia, empat belas di antaranya memiliki tingkat kesenjangan yang lebih tinggi dari nilai rata-rata.

Selanjutnya, dari sisi desentralisasi fiskal, besaran rata-rata DAU DBH per kapita tiap provinsi sepanjang periode pengamatan menunjukkan adanya fluktuasi yang sangat beragam. Data DAU DBH per kapita tersebut, yang diikhtisarkan dari Statistik Indonesia dan Statistik Keuangan Daerah Provinsi yang diterbitkan oleh BPS, adalah sebagai berikut.



Gambar 4. Rata-rata DAU DBH Per Kapita Per Provinsi Periode 2007 s.d. 2016

Sumber: Diolah dari Data www.BPS.go.id

Berdasarkan diagram batang tersebut, nilai rata-rata DAU DBH per kapita terendah terdapat pada provinsi Jawa Barat dengan nilai sebesar Rp56.360,49 sedangkan nilai tertinggi adalah provinsi Papua Barat, yaitu sebesar Rp2.150.376,89. Nilai median dan rata-rata data tersebut berturut-turut adalah Rp343.494,82 dan Rp435.142,74. Dengan demikian, hanya terdapat tiga belas provinsi yang dalam kurun waktu tahun 2007 s.d. 2016 rata-rata DAU DBH per kapitanya berada di atas nilai rata-rata nasional.

4.2. Analisis Data dan Pembahasan

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya dalam subbab Metode Analisis, data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode *Ordinary Least Square (OLS)*. Tahap awal dalam analisis tersebut dilaksanakan dengan meregresi koefisien Gini terhadap DAUDBHCAP baik untuk model *common effect*, *fixed effect*, maupun *random effect*. Tahap selanjutnya adalah penentuan model yang paling sesuai, uji asumsi klasik, dan terakhir adalah penafsiran atas hasil pengujian yang telah dilaksanakan. Seluruh hasil pengujian dari setiap tahap tersebut adalah sebagaimana tersaji dalam lampiran penelitian ini.

Penentuan model yang paling sesuai di antara *common effect* dan *fixed effect* dilaksanakan dengan menggunakan uji Chow. Karena hasilnya menunjukkan bahwa model *fixed effect* lebih sesuai, pengujian berikutnya yang harus dilaksanakan adalah uji Hausman. Uji Hausman tersebut dilaksanakan untuk menentukan model yang paling sesuai di antara *fixed effect* dan *random effect*. Hasilnya, model *fixed effect* terpilih sebagai model yang paling sesuai.

Uji asumsi normalitas yang dilaksanakan melalui *histogram – normality test* dari nilai residual model menunjukkan bahwa nilai probabilitasnya adalah sebesar 36,67% (lebih besar dari 5%) sehingga asumsi normalitas tersebut telah terpenuhi. Selanjutnya, uji autokorelasi yang dilaksanakan berdasarkan kriteria nilai Durbin-Watson model menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson model, yaitu sebesar 1,007 adalah lebih kecil daripada nilai dL, yaitu 1,8134. Dengan demikian, model mengalami autokorelasi positif. Demikian pula dengan asumsi homoskedastisitas. Uji *Glejser* yang dilakukan terhadap model menunjukkan bahwa nilai probabilitas yang dihasilkan adalah sebesar 0,08% (kurang dari 5%) sehingga model tersebut mengalami heteroskedastisitas.

Untuk memperbaiki kondisi tersebut, dilakukan beberapa tindakan. Menurut Gujarati (2004), mekanisme yang umumnya digunakan untuk memperbaiki autokorelasi adalah melalui skema *Auto Regressive* atau AR (1). Adapun untuk memperbaiki kondisi heteroskedastisitas yang ada diterapkan metode *Estimated Generalized Least Square (EGLS)*. Hasil dari perbaikan tersebut menunjukkan bahwa asumsi normalitas terpenuhi, yaitu dengan nilai probabilitas sebesar 56,89% (lebih dari 5%). Nilai Durbin-Watson yang dihasilkan adalah sebesar 2,1645 yang merupakan nilai dalam rentang dU (1,8255) dan 4-dU (2,1745) sehingga model terbebas dari autokorelasi. Adapun uji *Glejser* menunjukkan nilai probabilitas sebesar 18,39% (lebih besar dari 5%) yang berarti model tersebut memenuhi asumsi homoskedastisitas.

Setelah model yang sesuai terpilih dan seluruh asumsi yang diperlukan terpenuhi, penafsiran dan penarikan simpulan atas hasil analisis data dapat dilaksanakan dengan berdasarkan pada tabel berikut.

Tabel 1 Hasil Uji *Ordinary Least Square*
Sumber: Hasil Olah Data Peneliti

Dependent Variable: GINI
Method: Panel EGLS (Cross-section weights)
Date: 07/11/18 Time: 16:36
Sample (adjusted): 2008 2016
Periods included: 9
Cross-sections included: 33
Total panel (balanced) observations: 297
Iterate coefficients after one-step weighting matrix
Convergence achieved after 11 total coef iterations

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.498461	0.081229	6.136483	0.0000
DAUDBHCAP	-0.010487	0.006368	-1.646891	0.1008
AR(1)	0.524013	0.044501	11.77532	0.0000
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
Weighted Statistics				
R-squared	0.862203	Mean dependent var	0.412050	
Adjusted R-squared	0.844321	S.D. dependent var	0.158926	
S.E. of regression	0.019896	Sum squared resid	0.103717	
F-statistic	48.21601	Durbin-Watson stat	2.164561	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Berdasarkan Tabel 1 tersebut, koefisien determinasi (*Adjusted R-squared*) adalah 0,844. Hal ini berarti bahwa 84,4% variasi dalam kesenjangan pendapatan antarprovinsi yang diukur dengan GINI dapat dijelaskan oleh desentralisasi fiskal yang diukur dengan DAUDBHCAP. Adapun 15,6% sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model. Selanjutnya, Tabel 1 juga menunjukkan nilai F statistik sebesar 48,216 dengan probabilitas sebesar 0,000. Tingkat probabilitas tersebut lebih kecil daripada α pada tingkat 1%. Hal ini berarti hubungan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dalam model dapat digunakan untuk pendugaan. Terakhir, Tabel 1 juga menunjukkan probabilitas statistik *t* variabel DAUDBHCAP adalah 10,08% (lebih besar dari $\alpha = 5\%$) dengan tanda koefisien negatif. Hal ini berarti variabel bebas DAUDBHCAP berpengaruh negatif terhadap variabel bebas GINI pada tingkat signifikansi 10%.

Hasil ini sejalan dengan teori federalisme dan desentralisasi fiskal Musgrave. Berdasarkan teori tersebut, pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk melaksanakan distribusi pendapatan yang antara lain diwujudkan melalui mekanisme transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Selanjutnya alokasi dana transfer tersebut merupakan kewenangan pemerintah daerah berdasarkan pada keyakinan bahwa pemerintah daerah dapat melaksanakannya secara lebih efisien sesuai dengan kebutuhan dan preferensi lokal.

Di Indonesia, dana transfer semacam itu dikenal sebagai Dana Transfer Umum (DTU) yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). DAU

dan DBH tersebut diberikan kepada Pemerintah Daerah (pada penelitian ini pada tingkat provinsi) berdasarkan formula tertentu yang bertujuan untuk mengurangi adanya kesenjangan fiskal. Selanjutnya, alokasi dana transfer tersebut secara efisien oleh pemerintah provinsi diharapkan akan mampu mengurangi adanya kesenjangan pendapatan antarprovinsi di Indonesia.

Hasil ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian Suwanan dan Sulistiani (2009), Sudhipongpracha dan Wongpredee (2016), serta Kim dan Samudro (2017) yang menyatakan bahwa kebijakan desentralisasi fiskal berpengaruh dalam mengurangi kesenjangan pendapatan antarprovinsi di Indonesia. Namun, berbeda dengan penelitian terdahulu penelitian ini menggunakan data yang lebih mutakhir. Penelitian terdahulu paling mutakhir menggunakan data tahun 2011. Adapun penelitian ini menggunakan data tahun 2007 s.d. 2016. Dengan demikian, penelitian ini mengindikasikan adanya konsistensi peran kebijakan desentralisasi fiskal dalam mengurangi tingkat kesenjangan pendapatan antarprovinsi di Indonesia.

Di sisi lain, hasil penelitian ini bertentangan dengan Dyah (2012) yang menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesenjangan pendapatan antarprovinsi. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat desentralisasi fiskal yang diterapkan maka akan semakin meningkat pula kesenjangan yang ada. Perbedaan hasil tersebut dapat disebabkan oleh adanya perbedaan dalam pengukuran konsep desentralisasi fiskal. Penelitian Dyah hanya menggunakan DBH per kapita sebagai proksi desentralisasi fiskal, sedangkan penelitian ini menggunakan DAU dan DBH per kapita.

Perbedaan hasil tersebut dapat pula disebabkan oleh perbedaan yang signifikan dalam periode penelitian. Penelitian Dyah dilaksanakan selama periode 2003 s.d. 2009. Adapun penelitian ini dilaksanakan pada periode 2007 s.d. 2016. Sementara itu, selama kurun waktu perbedaan periode tersebut tidak menutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan dalam penerapan kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia. Misalnya, Haryanto (2017) menjelaskan bahwa berbagai kebijakan yang sifatnya antisipatif dan reaktif terus dijalankan dengan tetap mengutamakan aspek penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan proses desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Melalui revisi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah misalnya, pemerintah telah melakukan penguatan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Begitupula konsistensi pemerintah untuk menggunakan formula dalam perhitungan DAU serta keberanian menghilangkan aspek *hold harmless* yang akan memberikan jaminan alokasi DAU di suatu daerah dipastikan tidak akan mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, meskipun sesungguhnya memberikan tekanan fiskal yang besar terhadap APBN. Adapun bila dilihat dari sisi besaran alokasi anggaran dalam APBN, alokasi transfer ke daerah senantiasa meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2008, transfer ke daerah adalah sebesar Rp292,4 triliun atau sekitar 29,6% dari total belanja negara (Haryanto 2017). Adapun pada tahun 2018, dana transfer ke daerah dialokasikan sebesar Rp766,16 miliar atau 34,50% dari total anggaran belanja negara (Kemenkeu 2018). Perbaikan-perbaikan tersebut dapat meningkatkan efektivitas kebijakan desentralisasi fiskal dalam mengurangi kesenjangan pendapatan antarprovinsi di Indonesia selama periode 2007 s.d. 2016.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan pengujian *Ordinary Least Square* (OLS) yang dilaksanakan terhadap data dari 33 provinsi di Indonesia selama tahun 2007 s.d. 2016 dapat disimpulkan bahwa pada tingkat signifikansi 10% kebijakan desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan dalam mengurangi kesenjangan antarprovinsi di Indonesia. Hal ini mengonfirmasi teori federalisme dan desentralisasi fiskal Musgrave serta penelitian-penelitian terdahulu. Disamping itu, penggunaan data yang lebih mutakhir dalam penelitian ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu dapat menjadi sebuah indikasi adanya konsistensi kebijakan desentralisasi fiskal dalam mengurangi tingkat kesenjangan pendapatan antarprovinsi di Indonesia.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Implikasi dari temuan dalam penelitian ini adalah sebagai tolok ukur keberhasilan pemerintah dalam menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal, khususnya untuk mengurangi kesenjangan pendapatan antarprovinsi di Indonesia. Di samping itu, penelitian ini dilaksanakan dengan beberapa keterbatasan. Pertama, provinsi Kalimantan Utara sebagai provinsi yang baru terbentuk pada tahun 2012 dikeluarkan dari pengamatan karena permasalahan ketidakterediaan data tahun 2007 s.d. 2012. Kedua, keterbatasan dalam penelitian ini adalah dalam penentuan jumlah penduduk per tahun pada setiap provinsi. Data jumlah penduduk per tahun tersebut tidak dapat diperoleh karena sensus penduduk dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap sepuluh tahun sekali. Oleh karena itu, untuk mendapatkan jumlah penduduk per tahun per provinsi, penelitian ini menghitungnya secara tidak langsung dari data Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan PDRB per kapita provinsi sebagaimana disajikan oleh BPS.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, E., & Searle, B. (2006). On the implementation of transfers to subnational governments. Dalam E. Ahmad, & G. Brosio, *Handbook of Fiscal Federalism* (hal. 381–401). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Akai, N., & Sakata, M. (2005). Fiscal decentralization, commitment, and regional in equality: Evidence from state-level, cross-sectional data for the United States. *CIRJE Discussion Paper*, F-315.
- Aritenang, A. F. (2010). A Study on Indonesia Regions Disparity: Post Decentralization. *SSRN Electronic Journal*. doi:10.2139/ssrn.1737977.
- Bonet, J. (2006). Fiscal Decentralisation and Regional Income Disparities: Evidence from the Colombian Experience. *Annals of Regional Science*, 40(1), 661–676.
- Brid, M. R., & Smart, M. (2002). Intergovernmental fiscal transfers: International lessons for developing countries. *World Development*, 30(6), 899–912.
- Broadway, R., & Shah, A. (2007). *Intergovernmental Fiscal Transfer: Principles and Practice*. Washington, DC: World Bank.
- Dyah, S. M. (2012). The Impact of Fiscal Decentralisation on Income Inequality in Indonesia. The Okuma School of Public Management, Waseda University.
- Frumence, G., Nyamhanga, T., Mwangi, M., & Hurtig, A.-K. (2013). Challenges to the implementation of health sector decentralization in Tanzania: experiences from Kongwa district council. *Global Health Action*, 6, 20983.

- Gujarati, N. D. (2004). *Basic Econometrics* (4th ed.). New York: The McGraw-Hill Companies.
- Haryanto, T. J. (2017, 10 31). *Publikasi/Artikel dan Opini*. Dipetik 07 24, 2018, dari www.kemenkeu.go.id: <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/desentralisasi-fiskal-seutuhnya/>
- Kanbur, R., & Zhang, X. (2005). Fifty Years of Regional Inequality in China: a Journey Through Central Planning, Reform, and Openness. *Review of Development Economics*, 9(1), 87-106.
- Kim, E., & Samudro, Y. N. (2017). The impact of intergovernmental transfer funds on interregional income disparity in Indonesia. *International Journal of Urban Sciences*, 21(1), 22-40.
- Kim, E., Hong, S. W., & Ha, S. J. (2003). The impact of national development and decentralization policies on regional income disparity in Korea. *Annals of Regional Science*, 37, 79-91.
- Kim, Y.-H., & Smoke, P. (2003). The Role and Challenges of Intergovernmental Transfers in Asia. Dalam Y.-H. Kim, & P. Smoke, *Intergovernmental Fiscal Transfers in Asia: Current Practice and Challenges for the Future* (hal. 1-19). Manila: Asian Development Bank.
- Köthenbürger, M. (2002). Tax Competition and Fiscal Equalization. *International Tax and Public Finance*, 9, 391-408.
- Lewis, B. D. (2002). The New Indonesian Equalization Transfer. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 37 (3), 325-343.
- Musgrave, R. (1959). *The Theory of Public Finance – A Study in Public Economy*. New York: McGraw-Hill.
- Oates, W. (1972). *Fiscal Federalism*. New York: Harcourt Brace Jovanovich.
- Oates, W. E. (1999). An Essay on Fiscal Federalism. *Journal of Economic Literature*, 37(3), 1120-1149.
- Schroeder, L. (2007). Forecasting local revenues and expenditures. Dalam A. Shah, *Public Sector Governance and Accountability Series: Local Budgeting* (hal. 53-78). Washington, DC: The World Bank.
- Shankar, R., & Shah, A. (2003). Bridging the Economic Divide Within Countries: A Scorecard on the Performance of Regional Policies in Reducing Regional Income Disparities. *World Development*, 31(8), 1421-1441.
- Sorens, J. (2014). Fiscal federalism, jurisdictional competition, and the size of government. *Constitutional Political Economy*, 25(4), 354-375.
- Sudhipongpracha, T., & Wongpredee, A. (2016). Fiscal Decentralization in Comparative Perspective: Analysis of the Intergovernmental Grant Systems in Indonesia and Thailand. *Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice*, DOI:10.1080/13876988.2016.1138659.
- Suwanan, A. F., Sulistiani, & Heni, E. (2009). Fiscal Decentralization and Regional Disparities In Indonesia: A Dynamic Panel Data Evidence. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 24(3), 328-336.
- Tanzi, V. (1995). Fiscal federalism and decentralization: a review of some efficiency and macroeconomic aspects. In M. Bruno and B. Pleskovic (eds). *Annual World Bank Conference on Development Economics 1995*. Washington, DC: World Bank.
- Vo, D. H. (2010). The Economics of Fiscal Decentralization. *Journal of Economic Surveys*, 24 (4), 657-679.

LAMPIRAN**Tabel - Common Effect Model**

Dependent Variable: GINI
 Method: Panel Least Squares
 Date: 07/11/18 Time: 16:21
 Sample: 2007 2016
 Periods included: 10
 Cross-sections included: 33
 Total panel (balanced) observations: 330

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.361487	0.031509	11.47261	0.0000
DAUDBHCAP	-0.000229	0.002493	-0.091644	0.9270
R-squared	0.000026	Mean dependent var		0.358606
Adjusted R-squared	-0.003023	S.D. dependent var		0.039762
S.E. of regression	0.039822	Akaike info criterion		-3.602741
Sum squared resid	0.520145	Schwarz criterion		-3.579716
Log likelihood	596.4523	Hannan-Quinn criter.		-3.593557
F-statistic	0.008399	Durbin-Watson stat		0.336248
Prob(F-statistic)	0.927037			

Tabel - Fixed Effect Model

Dependent Variable: GINI
 Method: Panel Least Squares
 Date: 07/11/18 Time: 16:23
 Sample: 2007 2016
 Periods included: 10
 Cross-sections included: 33
 Total panel (balanced) observations: 330

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.081645	0.068463	-1.192547	0.2340
DAUDBHCAP	0.034923	0.005430	6.431777	0.0000
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.655936	Mean dependent var		0.358606
Adjusted R-squared	0.617577	S.D. dependent var		0.039762
S.E. of regression	0.024589	Akaike info criterion		-4.475702
Sum squared resid	0.178968	Schwarz criterion		-4.084281
Log likelihood	772.4909	Hannan-Quinn criter.		-4.319570
F-statistic	17.10012	Durbin-Watson stat		1.007013
Prob(F-statistic)	0.000000			

Tabel – Random Effect Model

Dependent Variable: GINI
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 07/11/18 Time: 16:26
 Sample: 2007 2016
 Periods included: 10
 Cross-sections included: 33
 Total panel (balanced) observations: 330
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.114010	0.053043	2.149368	0.0323
DAUDBHCAP	0.019403	0.004185	4.636582	0.0000
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.030842	0.6114
Idiosyncratic random			0.024589	0.3886
Weighted Statistics				
R-squared	0.058320	Mean dependent var		0.087667
Adjusted R-squared	0.055449	S.D. dependent var		0.026028
S.E. of regression	0.025296	Sum squared resid		0.209878
F-statistic	20.31360	Durbin-Watson stat		0.833545
Prob(F-statistic)	0.000009			
Unweighted Statistics				
R-squared	-0.188961	Mean dependent var		0.358606
Sum squared resid	0.618449	Durbin-Watson stat		0.282873

Tabel – Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
 Equation: FIXED_EFFECT
 Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	17.633810	(32,296)	0.0000
Cross-section Chi-square	352.077234	32	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: GINI
 Method: Panel Least Squares
 Date: 07/11/18 Time: 16:29
 Sample: 2007 2016
 Periods included: 10
 Cross-sections included: 33
 Total panel (balanced) observations: 330

Tabel – Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: RANDOM_EFFECT

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	20.122619	1	0.0000

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
DAUDBHCAP	0.034923	0.019403	0.000012	0.0000

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: GINI

Method: Panel Least Squares

Date: 07/11/18 Time: 16:30

Sample: 2007 2016

Periods included: 10

Cross-sections included: 33

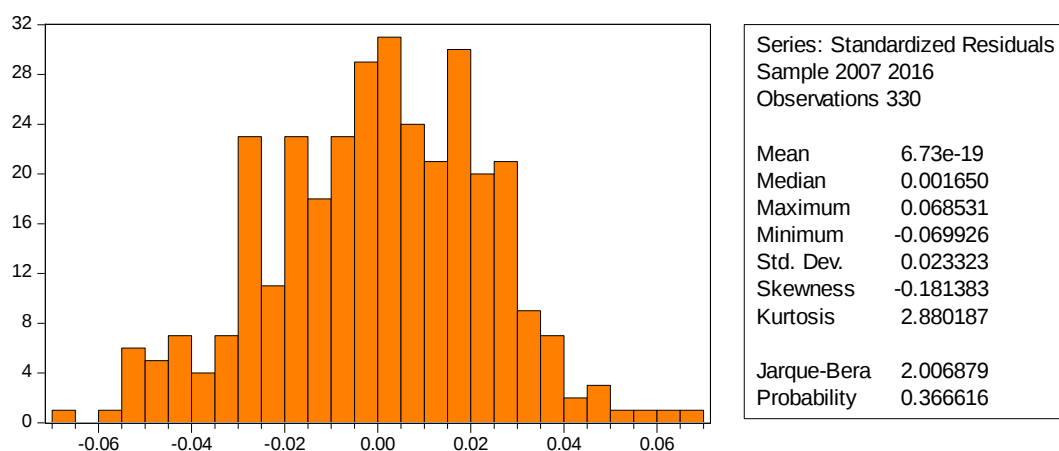
Total panel (balanced) observations: 330

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.081645	0.068463	-1.192547	0.2340
DAUDBHCAP	0.034923	0.005430	6.431777	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.655936	Mean dependent var	0.358606
Adjusted R-squared	0.617577	S.D. dependent var	0.039762
S.E. of regression	0.024589	Akaike info criterion	-4.475702
Sum squared resid	0.178968	Schwarz criterion	-4.084281
Log likelihood	772.4909	Hannan-Quinn criter.	-4.319570
F-statistic	17.10012	Durbin-Watson stat	1.007013
Prob(F-statistic)	0.000000		

Tabel – Uji Normalitas Awal**Tabel – Uji Autokorelasi Awal**

	dL	dU	4-dU	4-dL	
	0	1,8134	1,8255	2,1745	2,1866
Ket.	(+)	Ragu	Baik	Ragu	(-)
Durbin-Watson	1,007				

Tabel – Uji Heteroskedastisitas Awal

Dependent Variable: RESABS01
 Method: Panel Least Squares
 Date: 07/11/18 Time: 16:34
 Sample: 2007 2016
 Periods included: 10
 Cross-sections included: 33
 Total panel (balanced) observations: 330

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.141782	0.036348	3.900734	0.0001
DAUDBHCAP	-0.009763	0.002883	-3.386744	0.0008
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.205484	Mean dependent var		0.018706
Adjusted R-squared	0.116906	S.D. dependent var		0.013892
S.E. of regression	0.013055	Akaike info criterion		-5.742024
Sum squared resid	0.050445	Schwarz criterion		-5.350603
Log likelihood	981.4340	Hannan-Quinn criter.		-5.585892
F-statistic	2.319814	Durbin-Watson stat		1.729161
Prob(F-statistic)	0.000115			

Tabel – Fixed Effect Model Final

Sample (adjusted): 2008 2016

Periods included: 9

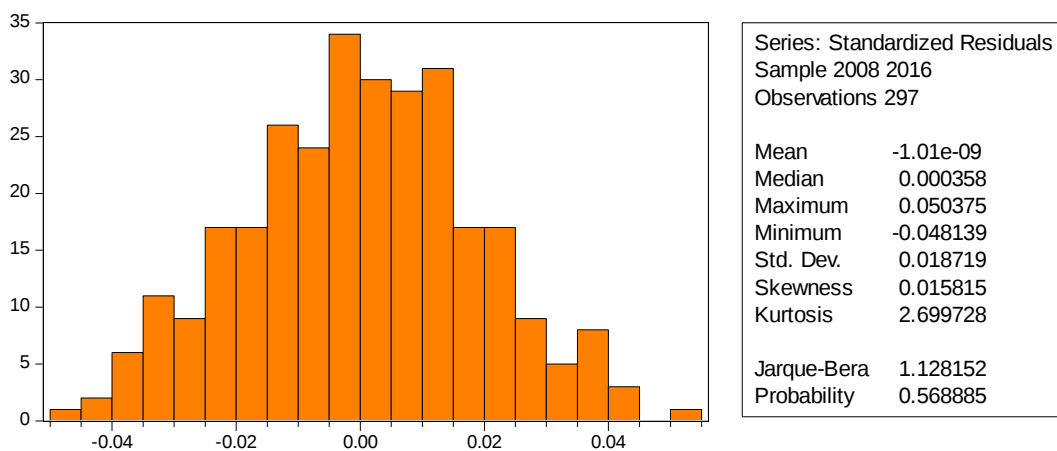
Cross-sections included: 33

Total panel (balanced) observations: 297

Iterate coefficients after one-step weighting matrix

Convergence achieved after 11 total coef iterations

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.498461	0.081229	6.136483	0.0000
DAUDBHCAP	-0.010487	0.006368	-1.646891	0.1008
AR(1)	0.524013	0.044501	11.77532	0.0000
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
Weighted Statistics				
R-squared	0.862203	Mean dependent var	0.412050	
Adjusted R-squared	0.844321	S.D. dependent var	0.158926	
S.E. of regression	0.019896	Sum squared resid	0.103717	
F-statistic	48.21601	Durbin-Watson stat	2.164561	
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.774019	Mean dependent var	0.361785	
Sum squared resid	0.105071	Durbin-Watson stat	2.178907	
Inverted AR Roots	.52			

Tabel – Uji Normalitas Final

Tabel – Uji Autokorelasi Final

	dL	dU	4-dU	4-dL	
	0	1,8134	1,8255	2,1745	2,1866
Ket.	(+)	Ragu	Baik	Ragu	(-)
Durbin-Watson			2,1645		

Tabel – Uji Heteroskedastisitas Final

Dependent Variable: RESABS02

Method: Panel EGLS (Cross-section weights)

Date: 07/11/18 Time: 16:42

Sample (adjusted): 2009 2016

Periods included: 8

Cross-sections included: 33

Total panel (balanced) observations: 264

Iterate coefficients after one-step weighting matrix

Convergence achieved after 8 total coef iterations

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.049943	0.027123	1.841379	0.0669
DAUDBHCAP	-0.002853	0.002141	-1.332975	0.1839
AR(1)	-0.199405	0.059267	-3.364503	0.0009
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
Weighted Statistics				
R-squared	0.228879	Mean dependent var		0.015480
Adjusted R-squared	0.114389	S.D. dependent var		0.011792
S.E. of regression	0.011323	Sum squared resid		0.029362
F-statistic	1.999120	Durbin-Watson stat		2.053254
Prob(F-statistic)	0.001571			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.132870	Mean dependent var		0.013535
Sum squared resid	0.029829	Durbin-Watson stat		2.006577
Inverted AR Roots	-.20			